

## EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN EFISIENSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMP N KABUPATEN KENDAL

Rias Dewi Setyowati<sup>1</sup>, Mudzalifah<sup>2</sup>, Mardiman<sup>3</sup>, Nurkolis<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas PGRI Semarang

<sup>1</sup>[ri4s.dewi@gmail.com](mailto:ri4s.dewi@gmail.com), <sup>2</sup>[lifahtik@gmail.com](mailto:lifahtik@gmail.com),  
<sup>3</sup>[likhiman.com@gmail.com](mailto:likhiman.com@gmail.com), <sup>4</sup>[nurkolis@upgris.ac.id](mailto:nurkolis@upgris.ac.id)

### ABSTRACT

*The aims of this research are 1) to determine the application of the principles of justice and efficiency in education financing. 2) to determine the effectiveness of the application of the principles of justice and efficiency in financing education for SMP N Kendal Regency. Researchers use mixed methods research, namely a combination of qualitative and quantitative methods. In data collection techniques, researchers used interview techniques with informants, distributing questionnaires and documentation. To analyze quantitative data, multiple regression is used as a data analysis technique with the F test and t test. The results of the research are 1) the school principal designs a budget that is aligned with the needs of the school program. School budget activity plans are made fairly without any discrimination in certain school programs and the budget draft is in line with JUKNIS. Implementation of the principle of efficiency by spending according to needs and on target. 2) Effectiveness of implementing the principles of justice and efficiency in financing education at SMP N Kendal Regency. The results of multiple regression analysis show the equation  $\hat{Y} = 2.557 + 0.813X_1 + 393X_2$ . The effectiveness of the principles of justice and efficiency in financing Kendal Regency High School education is 76.2%. The author suggests that the education office provide training to school principals so they can better understand the aims and objectives of education financing.*

**Keywords:** Principles of Justice, Principles of Efficiency, Education Financing

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dan efisensi dalam pembiayaan pendidikan 2) untuk mengetahui efektifitas penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal. Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode campuran, yakni adanya penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap informan, penyebaran angket serta dokumentasi. Untuk menganalisis data kauntitatif menggunakan regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis data dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian yaitu 1) kepala sekolah melakukan rancangan anggaran yang diselaraskan pada kebutuhan program sekolah. Rencana kegiatan anggaran sekolah dibuat secara adil tanpa adanya diskriminasi pada program sekolah tertentu dan rancangan anggaran agar selaras dengan JUKNIS. Pelaksanaan prinsip efisiensi dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. 2) Efektivitas penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal. Hasil analisis regresi ganda menunjukkan persamaan  $\hat{Y} = 2,557 + 0,813X_1 + 393X_2$ .

Besar efektivitas prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan SMA N Kabupaten Kendal sebesar 76,2 %. Penulis menyarankan dinas pendidikan memberikan pelatihan kepada kepala sekolah agar dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Prinsip Efisiensi, Pembiayaan Pendidikan

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Hasan: 2010: 35). Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan.

Sekolah merupakan sebuah Lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam tidak dapat terpisah dari pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan.

Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan melalui tahapan perencanaan, pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan ((Ulpha, 2016: 27).

Semua tahapan itu harus dilewati dengan lengkap dan sempurna agar hasil yang diharapkan dari pengelolaan pembiayaan pendidikan bisa dirasakan dampaknya oleh sekolah. Biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya (Ainul, 2017: 236). Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berapa besar uang yang harus dibelanjakan, darimana sumber uang diperoleh dan kepada siapa uang harus dialokasikan (Imam, 2016: 195). Manajemen pembiayaan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam menyusun RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Sisi lain dari pembiayaan pendidikan adalah alokasi, untuk hal ini pembiayaan dalam dua jenis yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung (Muhajirin, 2012: 171).

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial

dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka pembentukan potensi sumberdaya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna.

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Ferdi, 2013: 566).

Kata kunci tidak diskriminatif disini berlaku untuk pembiayaan pendidikan, artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti

pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber dananya tetapi juga penggunaan dana secara efisien.

Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Efektivitas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan (Budaya, 2019: 42).

Sesuatu disebut efektif apabila sesuatu itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, harus memfokuskan pada program-program yang menjadi objek biaya, supaya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini, kemampuan pengelolaan pembiayaan sekolah

dalam menentukan strategi menjadi faktor penting (Ririn, 2017: 198).

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun-tahun dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program (Siti, 2017: 5).

Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan secara efektif menunjuk pada suatu rasio antara masukan (input) dan keluaran (output) yang dapat dibandingkan minimal sama. Efisiensi biaya memberikan penekanan pada alokasi anggaran atau penggunaan dana terhadap kegiatan proses belajar mengajar (PBM) secara langsung. Setiap sekolah awal tahun anggaran sudah menentukan rencana penggunaan biaya sesuai kebutuhan riil sekolah berorientasi pencapaian (Sagala, 2019: 141).

Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan, keuangan (fiscal), serta didukung

dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam penganggaran yaitu perkiraan dan pengeluaran.

Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan di dalam madrasah. Untuk itu, setiap penanggung jawab program harus menjalankan aktivitas sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk menelusuri distribusi dana yang dianggarkan itu tentunya dibutuhkan informasi biaya pendidikan yang akurat melalui analisis pembiayaan pendidikan nasional secara keseluruhan. Analisis pembiayaan ini sangat penting karena besar kecilnya biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa dan profesionalisme guru. Kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan dapat membawa dampak positif pada pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara berkembang menjadi manusia yang berkualitas (Yoto < 2012: 79).

Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan pendidikan, proses penganalisaannya dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang diperoleh antara input dan output dari keseluruhan proses pendidikan (Dedy, 2011: 42). Program kerja menyesuaikan diri dengan ketersediaan dana sekolah. Idealnya, sekolah mampu menyediakan dana untuk program kerja rutin dan pengembangan terkait delapan standar pendidikan. Maka, sekolah selalu meningkatkan mutunya setiap tahun karena program kerja yang terarah dan terukur sesuai kebutuhan standar mutu nasional pendidikan (Jejen, 2015: 221).

Di SMP N Kabupaten Kendal pembiayaan pendidikannya telah berjalan efektif sesuai rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Anggaran yang dirumuskan harus sesuai dengan rencana tahunan yang memuat RAPBS. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah harus adanya pemenuhan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sekolah setiap tahunnya. RAPBS ini pun dituntut mencakup semua anggaran kegiatan rutin dan biaya penting lainnya, agar

kesemuanya itu dapat dilaksanakan satu tahun.

Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup dalam kegiatan untuk pengembangan sekolah itu sendiri. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di programkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas VII, VIII dan IX di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu

pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional (Ahmad, 2019: 13).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ini ingin mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMPN Kabupaten Kendal? 2) Bagaimanakah efektivitas penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMPN Kabupaten Kendal? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMPN Kabupaten Kendal. 2) untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMPN Kabupaten Kendal.

Untuk mengetahui kebaruan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan kajian penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah (2016)

Hasil penelitian adalah Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu mengelola keuangan sekolah dengan baik, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Rizal (2023) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, untuk mencapai pembiayaan yang baik sekolah perlu memahami manajemen pengelolaan keuangan dengan cara melihat dari efektivitas dan efisiensi yang dilakukan. Dengan begitu sekolah tidak perlu untuk mengamburkan banyak anggaran yang dilakukan. Lembaga pendidikan harus benar-

benar memahami efektifitas pembiayaan, dengan cara memahami pembiayaan pendidikan baik itu tatanan makro (nasional) maupun mikro (sekolah), serta beberapa jenis biaya pendidikan seperti biaya langsung (*direct cost*), tidak langsung (*indirect cost*), biaya pribadi (*private cost*) biaya sosial (*social cost*), biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) maupun biaya yang bukan dalam bentuk uang (*non-monetary cost*). Adapun hasil dari pengelolaan pendidikan agar menjadi pengelolaan yang efektif dan efisien dapat dilihat dari efisiensi internal yang mana harus menghasilkan output yang diinginkan dengan biaya maksimum dan efisiensi eksternal hal ini dapat dilihat dari rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proses pendidikan.

Fatra (2017) Sumber pendapatan di SMA Muhammadiyah 1 Palembang tercantum dana dilakukan secara efisiensi yaitu menggunakan anggaran sesuai dengan RAPBS yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran, mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan benar, efektif dan efisien. Pertanggungjawaban

keuangan sekolah dibuat oleh bendahara dan Kepala sekolah diketahui oleh komite sekolah setiapbulan, disertai dengan kelengkapan dan berbagai data pendukung, yang berupa bukti pengeluaran, dan perincian pengeluaran keuangan. Selain dalam bentuk laporan bulanan, pertanggung jawaban keuangan sekolah dibuat secara berkala dalam bentuk laporan triwulan dan lapaoran tahunan. Penyampaian laporan bulanan kepada masyarakat disampaikan dengan cara ditempel pada papan pengumuman, sehingga setiap masyarakat, melalui siswa dan komite sekolah dapat membaca laporan keuangan.

Dari hasil studi penelitian sebelumnya didapatkan beberapa persamaan dalam prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kebaharuan pada penelitian ini yakni penulis fokus pada efektifitas penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMPN 2 Kabupaten Kendal.

**Manajemen**                      **Pembiayaan**  
**Pendidikan**

Rohiat (2012: 4) berpandangan bahwa, manajemen merupakan suatu alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Ramayulis dan Mulyadi (2017: 70) ialah, suatu proses kerjasama antar personil madrasah untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan madrasah. Dengan kata lain, manajemen di lembaga pendidikan berkaitan erat dengan pengelolaan lembaga dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mulyono (2016: 81), penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu lembaga. Pembiayaan pendidikan mengandung arti ialah sejumlah uang yang berhasil dihimpun dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar siswa, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, kegiatan ekstra kurikuler siswa dan pengadaan buku pelajaran.

Menurut Rohiat (2012: 27), biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdapat



pemisahan antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang berwenang mengambil tindakan yang menyebabkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan adalah proses menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat kemudian mengalokasikannya untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, dimana proses tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tahapan Manajemen Pembiayaan Menurut Sri Minarti (2011: 213), dalam manajemen pembiayaan sekolah, terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan, dan penggunaan anggaran sekolah. Namun, agar lebih mudah menganalisis tahapannya, maka sebaiknya menggunakan alur yang sudah baku dalam ilmu manajemen.

Menurut Abu bakar dan Taufani/Tim Dosen UPI (2019: 257), manajemen memiliki tahapan penting

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), tahap pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian (*auditing*). Di samping itu, dirangkum dari Mulyasa (2013: 198), ada tiga tahapan dalam keuangan sekolah, yaitu perencanaan keuangan sekolah, pelaksanaan keuangan, dan evaluasi atau pertanggungjawaban keuangan sekolah.

### **Prinsip Manajemen Pembiayaan**

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip manajemen keuangan secara umum yaitu: a) *Value for Money*, b) Akuntabilitas, c) Transparansi, dan d) Integritas

Berdasarkan bentuk nyata setiap pilar dalam tata kelola pendidikan, maka fungsi manajemen atau pengelolaan sekolah yang bersinggungan adalah dalam: a) Tata kelola dan fungsi perencanaan dan penganggaran disekolah. b) Tata

kelola dan fungsi implementasi program dan kegiatan

Disekolah. c) Tata kelola dan fungsi monitoring dan evaluasi d) Tata kelola dan fungsi pelaporan dan pertanggung jawaban. e) Tata kelola dan fungsi kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran (2) prosedur akuntansi keuangan (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian (4) prosedur investasi, dan (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator dan bendaharawan.

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode campuran, yakni adanya penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2016). Pada prosesnya, metode kuantitatif tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, objektif dan terpercaya. Pendekatan kualitatif dipergunakan dalam menyikapi permasalahan penelitian ini yang menghasilkan data kuantitatif yang menjelaskan data kualitatif.

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap informan, penyebaran angket serta dokumentasi. Sedangkan pada proses penganalisis data, teknik analisis deskriptif menjadi metode yang digunakan oleh peneliti, yang merupakan pendapat dan penjelasan dari masing-masing sudut pandang yang sedang diteliti. Analisis data pada penelitian kualitatif diproses disaat terkumpulnya data dalam kurun waktu yang ditentukan (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: 56). Untuk menganalisis data kauntitatif menggunakan regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis data dengan uji F dan uji t.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Prinsip Keadilan dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut:

Prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal yaitu kepala

sekolah melakukan rancangan anggaran yang diselaraskan pada kebutuhan program sekolah. Rencana kegiatan anggaran sekolah dibuat secara adil tanpa adanya diskriminasi pada program sekolah tertentu di tiap SMPN di Kabupaten Kendal sebagai bentuk adil dan tidak membedakan kegiatan. Pada penyusunan RKAS sekolah juga melibatkan komite sekolah, guru dan staff agar rancangan anggaran agar selaras dengan JUKNIS.

Pelaksanaan prinsip efisiensi pada pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, agar semua kebutuhan program sekolah dapat terlaksana dengan baik. Efisiensi anggaran diselaraskan dengan RAPBS dan RKAS sekolah dan disesuaikan dengan indikator ketercapaian pembelajaran anggaran.

Perihal efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri Kabupaten Kendal bahwasannya juga terbuka untuk pembelanjaan dan pelaksanaan pihak sekolah memberikan

kesempatan terhadap komite sekolah untuk melakukan pengawasan penerapan anggaran operasional/program sekolah.

Keikutsertaan para pihak orang tua yang merupakan komite sekolah SMP N Kabupaten Kendal sebagai kontrol dan pengawasan dalam efisiensi pembiayaan pendidikan.

## **2. Efektivitas Penerapan Prinsip Keadilan dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal**

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda perolehan statistik pada efektivitas keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal dengan hasil penelitian sebagian terkomputerisasi melalui program SPSS dan penganalisisan regresi berganda dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa model hubungan keadilan dan efisiensi terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan dinyatakan dengan persamaan  $\hat{Y} = 2,557 + 0,813X_1 + 393X_2$  Nilai koefisien regresi variabel keadilan adalah

0,813, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan keadilan sebesar 1, maka efektivitas pembiayaan pendidikan akan meningkat 0,813 jika tidak ada pengaruh variabel bebas lainnya. Begitu juga untuk nilai koefisien regresi variabel efisiensi adalah 0,393, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan efisiensi sebesar 1, maka efektivitas pembiayaan pendidikan akan meningkat 0,393 jika tidak ada pengaruh variabel bebas lainnya.

Hasil uji *t* parsial menunjukkan nilai signifikansi variabel  $X_1$  terhadap  $Y$  0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti variabel keadilan berpengaruh terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan. Nilai signifikansi variabel  $X_2$  terhadap  $Y$  0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti efisiensi berpengaruh terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan. Sedangkan Uji *t* Parsial berdasarkan nilai  $t_{hitung} X_1$  terhadap  $Y$  sebesar 6,679 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.660081. Ini berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,679 > 1.660081$ ) maka variabel keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pembiayaan

Pendidikan SMP N Kabupaten Kendal. Nilai  $t_{hitung} X_2$  terhadap  $Y$  sebesar 5,303 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.660081. Ini berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.303 > 1.660081$ ) maka variabel efisiensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal.

Besar efektivitas prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal diperoleh dari nilai *R square* sebesar 76,2 %, sisanya 23,8 % dipengaruhi oleh faktor lain

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan, Dimana penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal berjalan baik dikarenakan selaras dengan yang diharapkan.

1. Penerapan Prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, kepala sekolah melakukan rancangan anggaran yang diselaraskan pada kebutuhan program sekolah. Rencana kegiatan anggaran sekolah dibuat secara adil tanpa

adanya diskriminasi pada program sekolah tertentu di tiap SMPN di Kabupaten Kendal sebagai bentuk adil dan tidak membedakan kegiatan. Pada penyusunan RKAS sekolah juga melibatkan komite sekolah, guru dan staff agar rancangan anggaran agar selaras dengan JUKNIS.

Pelaksanaan prinsip efisiensi pada pembiayaan pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, agar semua kebutuhan program sekolah dapat terlaksana dengan baik. Efisiensi anggaran diselaraskan dengan RAPBS dan RKAS sekolah dan disesuaikan dengan indikator ketercapaian pembelajaran anggaran.

2. Efektivitas Penerapan Prinsip keadilan dan efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP N Kabupaten Kendal. Hasil analisis regresi ganda menunjukkan persamaan  $\hat{Y} = 2,557 + 0,813X_1 + 393X_2$ . Besar efektivitas prinsip keadilan dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan SMP N Kabupaten Kendal sebesar 76,2 %

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar dan Taufani C. *Kurniatun*. 2019. dalam *Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan*. (Hal.255-276). Jakarta: Alfabeta.
- Ahmad Agus Dewi Muhajir. 2019. *Administrator. MTsN 2 Pamekasan*
- Ainul Mardiyah Usman, et. Al. 2017. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh." *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, 4(17).
- Armida. 2012. *Sistem Anggaran Pendidikan.* *Penelitian Pendidikan*
- Budi Budaya, 2018. Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1 (t.t), hlm., 42-45
- Dedy Achmad Kurniady, 2011. *Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung.* *Penelitian Pendidikan*.
- Fatra dan Edi Harapan.2017. Implementasi Prinsip dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Ferdi W. P. 2013. *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis.* *Pendidikan dan Kebudayaan*,

- Hasan Basri & Beni Ahmad Saebani. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Imam Machali & Ara Hidayat. 2016. *The Handbook of Education Management*. Jakarta: Kencana
- Irham Fahmi. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan, Teori dan Soal Tanya Jawab*. Bandung: Alfabeta
- Jejen Musfah. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Muhajirin. 2012. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Partisipasi Masyarakat.* *Educational Management*
- Muhimin, et. Al. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Mulyasa, E. 2017. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono, 2016. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Musfah, Jejen. 2015. *Manajemen Pendidikan, Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Prenada Group.
- Nur Rahmah. 2016. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Journal of Islamic Education Managemen*. Vo.1, No.1
- Ririn Tius Eka Margareta & Bambang Ismanto, 2017. *Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri.* *Manajemen Pendidikan*
- Rizal Hidayat, Mufthi Alam, Achmad Syarief Halim, Sukri Agustian. 2023. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pasca Covid-19. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Volume 6 Nomor 2
- Rohiat. 2012. *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sagala, Syaiful. 2013. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Saniyyah Sholihat, 2017. *Pengelolaan Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, dan Mutu Layanan Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Swasta.* *Administrasi Pendidikan*
- Sri Murtiah, Maisyaroh Desi Eri Kusumaningrum. 2019. *Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar Se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna. 2015. *Managemen Keuangan Teori, Praktek dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Syaiful Sagala. 2009. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta

Ulpha Lisni Azhari & Dedy Achmad Kurniady, 2016. *“Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. “Administrasi Pendidikan, XXI*

Yoto. 2012. Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.” *Jurnal Teknik Mesin*